

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Akuntansi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan untuk menghindari adanya kecurangan yang terjadi di organisasi. Adapun dalam Melakukan pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan sebagai upaya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah telah mengaturnya melalui standar akuntansi keuangan pemerintah seperti SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah (S A P – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, t.t.).

E-Government adalah suatu sistem yang berbasis teknologi dan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi administrasi publik dan hubungan dengan masyarakat. Dengan adanya *E-Government* diharapkan terciptanya tranparansi informasi, khususnya informasi keuangan. Sistem yang transparan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, yang berdampak tingginya tingkat korupsi. Pemerintah Indonesia sekarang berusaha untuk mengimplementasikan *E-Government* di setiap organisasi pemerintah. Hal ini dibuktikan dari penelitian (Verdania Latif dkk., 2019), Menyatakan Tranparansi mengenai kebijakan penyusunan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan masyarakat tidak begitu memperhatikan kebijakan yang ada dalam pemerintahan, ada tidaknya kebijakan tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat timbul dari hasil kinerja pemerintah yang jujur dan dapat diandalkan sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Masyarakat lebih memperhatikan hasil kerja pemerintah dengan memperhatikan penyimpangan antara anggaran dan realisasinya.

Akuntabilitas ialah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala (Mardiasmo, 2009). Hal ini dibuktikan penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, yang artinya semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka kepercayaan masyarakat akan semakin baik. Namun transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat yang artinya kurangnya transparansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Isna Apriliana, 2019).

Akuntabilitas dan transparansi dari Pemerintah merupakan prasyarat bagi terciptanya birokrasi dan Pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat. Keberhasilan akuntabilitas dapat dicapai dengan adanya pemimpin yang responsif dan akuntabel akan transparan kepada masyarakat maupun bawahannya (Sofyani & Tahar, 2021). Hal ini dibuktikan dari Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat Desa kasus di Kabupaten Bantul penelitian ini mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat desa terkait dengan transparansi, namun tidak dengan akuntabilitas. Karena studi dan literatur tentang pemerintahan desa masih terbatas, pemerintah desa perlu selalu menjaga transparansi secara optimal dengan memberikan akses dan informasi penting mengenai program dan pengelolaan dana kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat (Sofyani & Tahar, 2021).

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan antara manajer (pihak agen) dengan pemilik (pihak principal). Hubungan kontraktual dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan yaitu pihak principal yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent* untuk melakukan

semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan.

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala daerah dan aparat daerah (Ismail dkk., 2016). Akuntabilitas adalah kewajiban kepala daerah dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ismail dkk., 2016).

2. Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (jelas). Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata untuk memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Tim penyusun kamus pusat bahasa, 2005). Apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.

Menurut Putra (2017) transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya

kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan adalah awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkat (Putra, 2017). Adanya transparansi pengelolaan keuangan membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat adanya transparansi pengelolaan keuangan adalah dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban (Tim penyusun kamus pusat bahasa, 2005). Menurut Ensiklopedia Administrasi, Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasannya. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dimasukkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu (Prayogi, 2019).

Kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi yang tidak dapat diukur (kualitas) maupun dari segi yang dapat diukur (kuantitas) merupakan arti dari akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sendiri merupakan pelaku yang harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya pada masyarakat dalam proses yang dijalankannya tugas maupun wewenang, serta kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007).

4. Kepercayaan masyarakat

Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seringkali akan membentuk perilaku seseorang (Febriansyah & Ramayuniarti, 2016). Kepercayaan diartikan sebagai penilaian kolektif dari kelompok-kelompok tertentu yang akan berlaku secara jujur, sehingga dapat memenuhi komitmennya dan tidak merugikan orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu kelompok tidak akan bertentangan dengan ekspektasi kelompok lain.

Kepercayaan kepada pemerintah ini muncul berdasarkan penilaian secara subyektif dari masyarakat berdasarkan pengalaman yang mereka terima, sehingga ketika pelayanan publik diterima oleh masyarakat dan mencerminkan kinerja yang kompeten, andal, dan jujur serta memenuhi kebutuhan masyarakat maka dengan sendirinya kepercayaan itu meningkat. Menurut Penelitian Shaula, (2020) sebuah kepercayaan masyarakat dibangun atas transparansi dari lembaga publik dengan mempromosikan akuntabilitas, dan melihat seberapa berhasil program yang dilaksanakan.

C. Perumusan Hipotesis

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi pengelolaan keuangan adalah pengelolaan anggaran yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan keuangan daerah dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan daerah dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat. Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan daerah, pemerintah akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik.

Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan. Oktavia, (2020) menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Dengan adanya peningkatan transparansi menjadikan pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian dan pemikiran tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini diperoleh hipotesis pertama yaitu:

H₁: Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat

Akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yang menjadi pelaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Prinsip akuntabilitas ini memiliki pengertian bahwa kinerja dan tindakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan. dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah dan aparat daerah harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan (Prayogi, 2019).

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan daerah kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Isna Apriliana, (2019) menyatakan bahwa semakin mudah masyarakat mengakses

laporan keuangan maka semakin akuntabel pengelolaan alokasi dana desa dan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. dari penelitian diatas maka peneliti meperoleh hipotesis Kedua yaitu:

H₂: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat

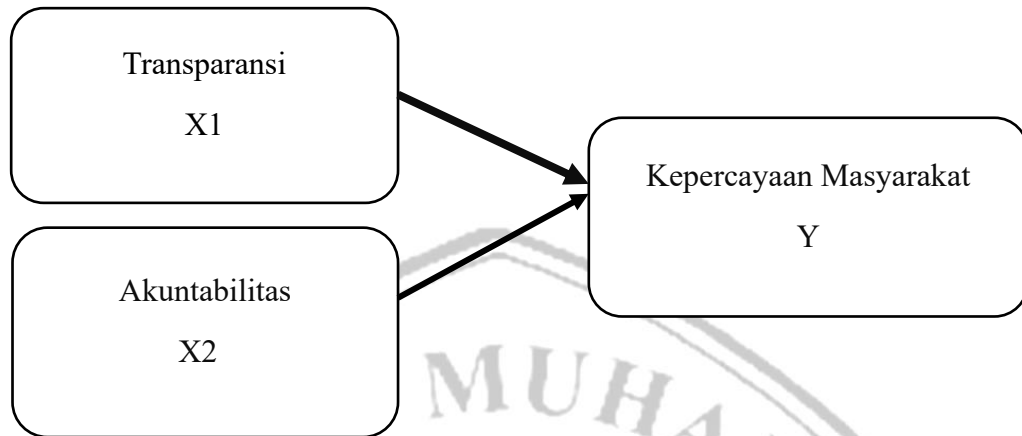
Akuntabilitas dan transparansi merupakan asas untuk melakukan pengelolaan keuangan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dengan dilaksanakannya akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat menjadikan pemerintah kota Ambon menjadi pemerintahan yang baik, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian dilakukan oleh (Oktavia, 2020) tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat mengemukakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. sehingga hipotesis ketiga ini yaitu:

H₃: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat.

D. Model Penelitian

Model penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

1. Variabel Independen:
 - Transparansi (X1)
 - Akuntabilitas (X2)
2. Variabel Dependen:
 - Kepercayaan Masyarakat (Y)